

# **BAB I**

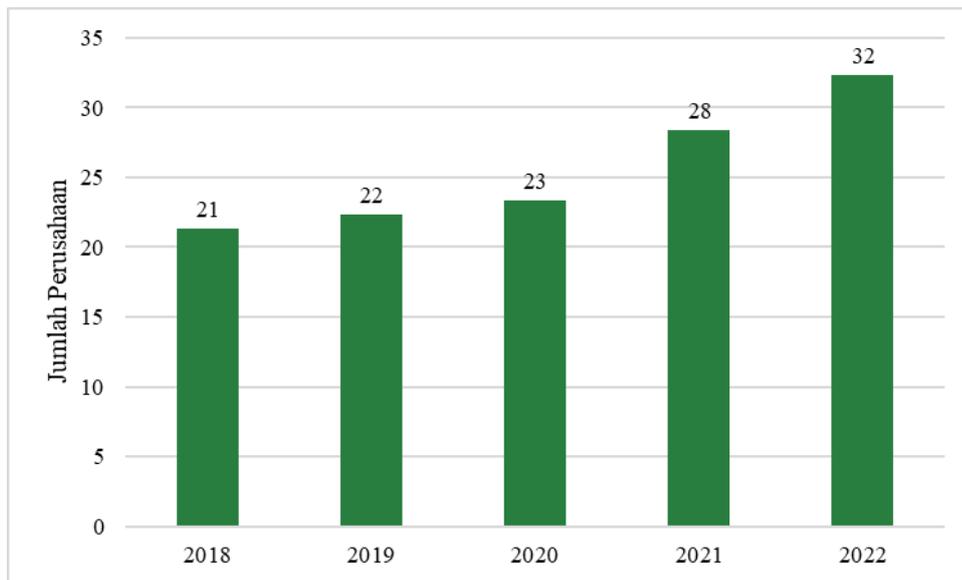
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa efek yang beroperasi di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX). Dikutip dari laman [gopublic.idx.co.id](http://gopublic.idx.co.id) (2021), mulai 25 Januari 2021, BEI melakukan implementasi klasifikasi baru atas sektor dan industri perusahaan tercatat yaitu *IDX Industrial Classification (IDX-IC)*. Klasifikasi sektor, subsektor, industri, dan subindustri didasarkan pada eksposur pasar atas barang dan jasa yang diproduksi. Klasifikasi dibagi menjadi empat tingkat, terdiri atas 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri, dan 130 subindustri.

Objek penelitian ini adalah salah satu subindustri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu perkebunan dan tanaman pangan (*plantations and crops*). Subindustri perkebunan dan tanaman pangan merupakan bagian dari sektor barang konsumen primer (*consumer noncyclicals*). Sebelum adanya pengklasifikasian terbaru, subindustri perkebunan dan tanaman pangan merupakan bagian dari sektor pertanian (*agriculture*). Sektor pertanian merupakan sektor yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, terutama dalam hal penggunaan energi. Penggunaan bahan bakar fosil dan sumber energi konvensional dalam sektor ini berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan degradasi lingkungan ([pertanian.uma.ac.id](http://pertanian.uma.ac.id), 2023).

Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa “Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Tanaman pangan adalah tanaman yang dapat menghasilkan produk untuk dikonsumsi (CNN Indonesia, 2024). Perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan produk tanaman pangan, seperti padi dan jagung, kacang, sayur-sayuran, buah-buahan, tebu, kopi, teh, kelapa sawit, dan coklat. Subindustri ini merupakan kekayaan alam Indonesia yang dapat diproduksi menjadi sumber energi tersendiri.



**Gambar 1.1**

**Perkembangan Jumlah Perusahaan Subindustri Perkebunan dan Tanaman Pangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022**

*Sumber: Bursa Efek Indonesia, data telah diolah oleh penulis (2024)*

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya selama periode 2018-2022. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020-2021 yaitu sebanyak lima perusahaan bergabung di tahun tersebut sehingga dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan mengalami peningkatan dengan selisih jumlah yang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup signifikan selama periode 2018-2022.

Berlandaskan pada laporan Kementerian Perindustrian pada tahun 2021, sektor pertanian (*agriculture*) atau yang saat ini dikategorikan sebagai subindustri perkebunan dan tanaman pangan berkontribusi sebesar 13,7% terhadap *gross domestic product* (GDP) Indonesia (Chika & Widianingsih, 2024). Kontribusinya yang signifikan terhadap GDP ikut serta menjadikannya sebagai penghasil gas rumah kaca (GRK) terbesar di Indonesia. Dalam laporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, sektor pertanian (*agriculture*) atau yang saat ini dikategorikan sebagai subindustri

perkebunan dan tanaman pangan berkontribusi sebesar 108.598 Giga ton CO<sub>2</sub>e selama 2019. Emisi GRK dalam jumlah besar dapat memicu berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim (*climate change*) (Chika & Widianingsih, 2024).

Sektor pertanian (*agriculture*) merupakan salah satu sektor sumber emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (Istiqomah et al., 2023). Menurut IPCC (2022), pertanian dan penggunaan lahan lainnya berkontribusi dalam 22% (13 Giga ton CO<sub>2</sub>-eq) emisi GRK global pada tahun 2019. Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC), World Meteorological Organization (WMO), dan United Nations Environment Programme (UNEP) telah mengumpulkan fakta bahwa aktivitas sektor pertanian memberikan dampak pada iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK). Bidang usaha yang mengelola pertanian, kehutanan, dan peternakan menghasilkan jumlah GRK yang signifikan sehingga menyebabkan peningkatan emisi GRK (Marvella & Breliastiti, 2023) yang memberi kontribusi pada isu mengenai pemanasan global.

Isu mengenai perubahan iklim dan pemanasan global tersebut menyebabkan perusahaan perlu menunjukkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pengungkapan informasi lingkungan yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

**Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Subindustri Perkebunan dan Tanaman Pangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022 yang Konsisten Menerbitkan Laporan Keberlanjutan**

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk
2	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
3	BWPT	PT Eagle High Plantations Tbk
4	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
5	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk
6	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama Tbk
7	SMAR	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
8	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

*Sumber: Data diolah dari situs web resmi perusahaan oleh penulis (2024)*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hanya terdapat 8 dari 32 perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan. Perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan keberlanjutannya mengindikasikan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi lingkungannya. Penting bagi perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan, terlebih dalam hal mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon yang dihasilkannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan (*plantations and crops*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 sebagai objek pada penelitian ini.

## **1.2 Latar Belakang**

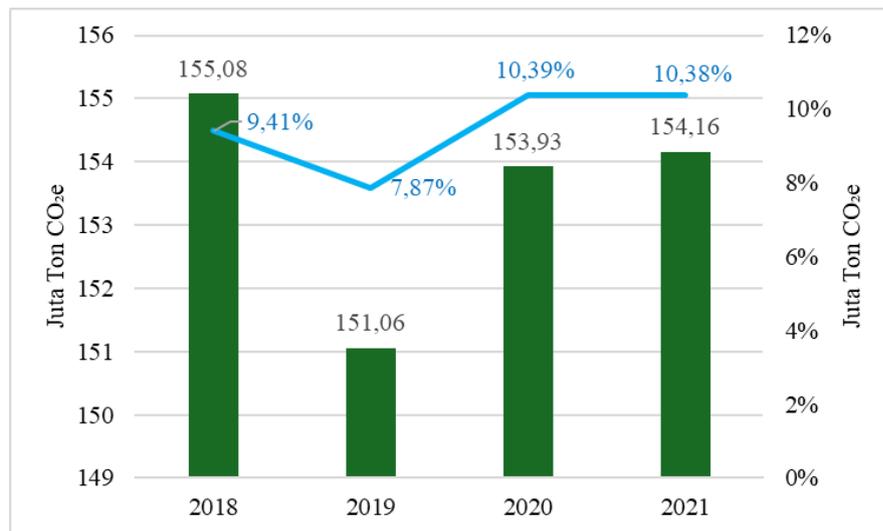
Perubahan iklim berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan sejalan dengan perkembangan industri, retensi karbon, dan peningkatan emisi karbon dari perusahaan, serta aktivitas manusia lainnya yang terakumulasi dari waktu ke waktu (Iswati, 2017 dalam Jannah & Narsa, 2021). Emisi karbon merupakan kontributor perubahan iklim dan pencemaran udara. Emisi yang berlebih dapat menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca sehingga menyebabkan peningkatan suhu di Bumi secara signifikan. Emisi karbon adalah gas yang keluar dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti CO<sub>2</sub>, solar, LPJ, dan bahan bakar lainnya. Secara sederhana, emisi karbon dapat diartikan sebagai pelepasan karbon ke atmosfer (Azkarizal, 2023). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) merupakan bagian terbesar dari gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Isu pemanasan global yang terjadi mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak negatif terhadap lingkungan melandasi terbentuknya Protokol Kyoto (sebuah perjanjian lingkungan), yang disepakati dan ditandatangani oleh para pemimpin dunia dan banyak pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC*) pada tahun 1997 untuk menurunkan emisi karbon secara global. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Protokol Kyoto (Nasih et al., 2019). Sejalan dengan perjanjian tersebut, Indonesia

meratifikasi Protokol Kyoto melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*), yang berisi kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam skala global (Nasih et al., 2019; Novianti et al., 2020). Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat serangkaian rencana sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan aksi global atau agenda pembangunan global yang berlaku sejak tahun 2015-2030. SDGs memiliki tujuan yang mencakup berbagai aspek keberlanjutan (aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang terdiri atas 17 tujuan. Tujuan ke-13 merupakan salah satu tujuan SDGs mengenai lingkungan (tindakan terhadap perubahan iklim) dengan target mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional (United Nations, 2022).

Sebagai tanggapan terhadap isu lingkungan tersebut, pemerintah Indonesia juga mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Chika & Widianingsih, 2024) dan mendeklarasikan target penurunan emisi baru. *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) Republik Indonesia 2022 mencatat bahwa Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% pada 2030 mendatang (Chika & Widianingsih, 2024). Namun, kondisi karbon di Indonesia saat ini mengkhawatirkan karena pertumbuhan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia yang terus meningkat. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam *JRC Science for Policy Report tentang GHG Emissions of All Countries*, Indonesia cenderung mengalami peningkatan emisi GRK selama 2018-2022. Selain itu, Indonesia menunjukkan peningkatan emisi GRK terbesar sebesar 10% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dengan besaran setara 2,3% dari total emisi GRK global (Crippa et al., 2023). Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada perubahan iklim dunia. Peningkatan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh sektor pertanian yang meliputi pertanian peternakan atau

*agriculture livestock* (fermentasi enterik, pengelolaan pupuk kandang), tanah pertanian (pupuk, aplikasi kapur, budidaya padi, emisi tanah langsung, emisi N<sub>2</sub>O tidak langsung dari pertanian), pembakaran lahan residu pertanian (Crippa et al., 2023).



**Gambar 1.2 Jumlah dan Kontribusi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian di Indonesia Periode 2018-2021**

*Sumber: Climate Watch (2022)*

Selama 2018-2021, jumlah dan kontribusi emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas*) sektor pertanian (*agriculture*) di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi emisi GRK. Tidak hanya itu, pada tahun 2020 dan 2021, sektor pertanian juga mengalami peningkatan jumlah emisi GRK. Peningkatan emisi yang terjadi setiap tahun di Indonesia memberikan ancaman dalam pengimplementasian strategi mitigasi GRK (World Bank Group, 2023). Gas yang termasuk GRK, antara lain karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), dan gas berfluorinasi (gas F). Sekitar 10%-12% dari total GRK yang terdiri dari gas metana (CH<sub>4</sub>) dan dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O) berasal dari pemakaian pupuk kimia oleh sektor pertanian (Marvella & Breliastiti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kedua gas tersebut merupakan sumber utama emisi di sektor pertanian (Agus et al., 2022). Sektor pertanian memiliki dampak signifikan terhadap emisi GRK, khususnya gas dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O). Gas dinitrogen oksida memiliki potensi pemanasan lebih tinggi daripada gas-gas rumah

kaca lainnya dan dapat bertahan di atmosfer selama lebih dari 100 tahun dan memiliki daya serap panas yang signifikan (Karl & Michaels, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk secara efektif menangani dimensi keberlanjutan sektor pertanian (Ika et al., 2024). Menanggapi isu tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan nasional, yaitu *Low Carbon Development Initiative*. Dalam hal ini, sektor pertanian (*agriculture*) merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk target penurunan emisi, yaitu mengurangi emisi dari sektor lahan (pertanian) sebesar 58,3% pada tahun 2024 (Istiqomah et al., 2023).

Terkait hal tersebut, salah satu upaya dalam Akuntansi untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam mencapai tujuan SDGs adalah melakukan pengungkapan emisi karbon melalui laporan yang menunjukkan penggunaan karbon dalam kegiatan perusahaan (Rini et al., 2021). Informasi mengenai emisi karbon umumnya disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*) (Chika & Widianingsih, 2024) maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara internal maupun eksternal (Salsabila, 2023). Salah satu aspek yang terdapat dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah lingkungan, yang di dalamnya terdapat indikator mengenai emisi karbon. Indikator tersebut penting untuk diungkapkan atau yang pada umumnya dikenal dengan istilah pengungkapan emisi karbon pada laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dengan tujuan utama untuk menginformasikan kepada publik mengenai kelestarian lingkungan dari kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan (Rini et al., 2021). Dengan kata lain, pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk pengungkapan lingkungan (Amaliyah & Solikhah, 2019).

Pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam mengatasi masalah lingkungan, terutama mengenai pemanasan global, serta

mencerminkan upaya perusahaan dalam mengurangi emisi karbon melalui perhitungan energi yang dikonsumsi, biaya lingkungan, dan kebijakan perusahaan mengenai penggunaan energi. Perhitungan energi maupun biaya lingkungan yang dikeluarkan, dan peraturan perusahaan tentang penggunaan energi disebut pengungkapan emisi karbon (Hapsari & Prasetyo, 2020). Pengungkapan emisi karbon bertujuan untuk memonitor dan mengurangi tingkat emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari akuntansi karbon (*carbon accounting*) yang terbentuk dari implikasi Protokol Kyoto (Irwhantoko & Basuki, 2016). Selain itu, pengungkapan emisi karbon merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk praktik tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan (Hapsari & Prasetyo, 2020). Namun, pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*) (Ganiardy & Viriany, 2023), kewajiban bagi emiten untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan baru diberlakukan mulai 2022 sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan (Chika & Widianingsih, 2024) sehingga pengungkapan emisi karbon hanya diterapkan oleh beberapa perusahaan (Kurnia et al., 2021 dalam Sulistyowati & Tumirin, 2023).

Pada dua dekade terakhir, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) semakin sadar terhadap perubahan iklim dan dampak emisi karbon, misalnya lembaga Carbon Disclosure Project (CDP) yang mendukung perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai emisi karbonnya dan mengintegrasikan praktik pengelolaan karbon (Herold, 2018). Berhubungan pengungkapan karbon, pembentukan komite keberlanjutan tingkat dewan, penerapan kebijakan perubahan iklim, perhitungan kuantitas emisi karbon merupakan praktik internal perusahaan, sedangkan aktivitas mengenai komunikasi dan keterlibatan untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa operasi perusahaan *legitimate* dan perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan merupakan tindakan eksternal perusahaan (Hörisch et al., 2014 dalam Herold, 2018). Pengungkapan emisi karbon perusahaan dalam laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan dapat diukur menggunakan *checklist* yang berisi 18 item tertentu yang diadaptasi dari kuesioner

CDP. Delapan belas item tersebut terbagi dalam lima kategori besar yang relevan dengan perubahan iklim dan emisi karbon, yaitu kategori penilaian risiko dan peluang perubahan iklim, pengungkapan kuantitas emisi karbon, kuantifikasi konsumsi energi, strategi pengurangan emisi karbon beserta biaya, dan akuntabilitas untuk mencapai upaya strategi terkait perubahan iklim (Choi et al., 2013).

Fenomena pengungkapan emisi karbon di Indonesia telah terjadi di beberapa perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata nilai pengungkapan emisi karbon menggunakan *checklist* yang dikembangkan oleh Choi et al., (2013), terdapat perbedaan hasil dalam perusahaan-perusahaan tersebut.



**Gambar 1.3 Rata-Rata Nilai Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Subindustri Perkebunan dan Tanaman Pangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022**

*Sumber: Data telah diolah oleh penulis (2024)*

Gambar 1.3 menunjukkan terdapat satu perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi, menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya (ANJT). Perusahaan tersebut telah baik dalam melakukan pengungkapan emisi karbon dan menunjukkan upaya transparansi dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Hal ini dapat berdampak baik bagi perusahaan yaitu menarik investor yang peduli terhadap lingkungan. Di sisi lain, terdapat beberapa perusahaan yang belum melakukan

pengungkapan emisi karbon dan menunjukkan upaya transparansi dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Hal ini dapat menyulitkan investor, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu bahwa perusahaan sektor pertanian (*agriculture*) atau yang saat ini telah disebut sebagai subindustri perkebunan dan tanaman pangan (*plantations and crops*) selama 2018-2022 masih banyak yang belum melakukan pengungkapan emisi karbon secara maksimal dan menyampaikan informasi mengenai emisi karbonnya secara transparan (Herinda et al., 2021; Ika et al., 2024; Jannah & Narsa, 2021; Novianti et al., 2020; Purnayudha & Hadiprajitno, 2022; Rohmah & Nazir, 2022; Sulistyowati & Tumirin, 2023; Syahdanti & Marietza, 2024). Hal ini juga menggambarkan bahwa terjadi ketidaksielarasan antara tindakan perusahaan terhadap peraturan dan tujuan pemerintah yaitu *net zero emission* pada tahun 2060 mendatang serta masih minimnya penerapan SDGs. Pengungkapan emisi karbon diperlukan untuk mencapai keselarasan antara tindakan perusahaan dengan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Selain itu, dalam upaya pengungkapan emisi karbon, perusahaan dituntut untuk menyampaikan tindakan yang telah dan akan dilakukan untuk mengelola risiko terkait perubahan iklim dan rincian rencana atau strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Choi et al., 2013). Salah satu tindakan tersebut adalah penetapan kebijakan berkelanjutan yaitu komitmen mengurangi atau menghilangkan deforestasi. Namun, kenyataannya, tindakan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang melibatkan salah satu perusahaan sektor pertanian atau yang saat ini merupakan perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yaitu PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (SMAR). Pada tahun 2010, Burger King membatalkan kontrak kerja samanya dengan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (SMAR) karena perusahaan tersebut tidak melaksanakan praktik pertanian secara berkelanjutan sehingga terlibat dalam perusakan hutan tropis (Sulistyowati & Tumirin, 2023; Astari et al., 2020). Dikutip dari Bisnis Tempo

(2010), hasil verifikasi yang dilakukan oleh auditor independen terhadap perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang tidak konsisten dengan komitmen tanggung jawab perusahaan. Keputusan Burger King untuk membatalkan kerja samanya juga diambil setelah keluarnya hasil verifikasi tim independen yang disusun oleh lembaga verifikasi Control Union Certification (CUC) dan BSI Group terhadap SMAR dan induk perusahaannya yaitu Golden Agri Resources (GAR) (Chandra, 2010). Selanjutnya, pada tahun 2019, emisi gabungan Sinar Mas Group dan perusahaan mereka lainnya, seperti Golden Agri Resources (GAR) dan Asia Pulp and Paper (APP) setara dengan hampir 3,5 kali lipat emisi tahunan Singapura. Hal ini karena deforestasi dan kebakaran pada lahan perkebunan kelapa sawit (Rahmawati & Achmad, 2019).

Kasus deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan untuk mengelola risiko terkait perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca dengan baik. Meskipun pengungkapan emisi karbon masih tergolong sukarela, perusahaan harus beroperasi sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat serta *stakeholder*. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya dengan memerhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat, termasuk *stakeholder*, seperti konsumen, masyarakat, dan lingkungan.

Perusahaan harus mempertahankan legitimasinya dengan mematuhi komitmen berkelanjutan dengan melakukan upaya pengungkapan emisi karbon, termasuk mengurangi atau menghilangkan deforestasi. Ketidapatuhan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan dapat mengancam legitimasi perusahaan dan memengaruhi hubungannya dengan *stakeholder*. SMAR gagal memenuhi komitmen berkelanjutan tersebut, yang mengancam legitimasinya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta merenggangkan hubungannya dengan *stakeholdernya*. Hal tersebut tergambar dari keputusan Burger King yang membatalkan kerja samanya dengan SMAR.

Penelitian ini dilandasi oleh teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih merupakan pengungkapan sukarela. Namun, perusahaan-perusahaan di Indonesia membutuhkan

keseimbangan secara ekonomi, lingkungan, sosial, dan ketentuan hukum karena pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan yang meningkatkan komitmen yang diperlukan untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK). Hal ini sesuai dengan pandangan teori legitimasi bahwa perusahaan dapat menjadi lebih *legitimate* seiring perusahaan mendapatkan lebih banyak perhatian dalam hal norma sosial dan nilai-nilai sosial dengan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah (Nasih et al., 2019) yaitu melakukan pengungkapan emisi karbon.

Menurut Valentinov et al. (2019), dalam konsep teori *stakeholder*, keberlanjutan perusahaan tergantung pada kepekaannya terhadap lingkungan masing-masing. Perusahaan membutuhkan dukungan atas tanggung jawab sosial dan lingkungannya, dukungan tersebut dapat diperoleh dari *stakeholder*. Dalam mempertimbangkan keputusan untuk memberi dukungan kepada perusahaan, *stakeholders* tidak hanya membutuhkan informasi finansial perusahaan, tetapi juga terkait informasi nonfinansial perusahaan yaitu terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) memerlukan laporan emisi karbon untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim yang diakibatkan oleh kegiatan operasional. Investor dan kreditor selalu mengharapkan kinerja optimal perusahaan (Syafira & Cahyaningsih, 2022), baik dari segi finansial maupun nonfinansial, termasuk dalam hal emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk komunikasi antara perusahaan dan *stakeholders* dengan tujuan mendapatkan dukungan atas tanggung jawab sosialnya (Purnayudha & Hadiprajitno, 2022). Singkatnya, teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan pelaporan karbon untuk menangkal risiko legitimasi bahkan ketika informasi tidak mencukupi dan teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan mengungkapkan emisi GRK sebagai tanggapan atas permintaan dari *stakeholder* eksternal (Ika et al., 2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan emisi karbon di perusahaan, yaitu *corporate governance* (dewan komisaris dan direksi yang dilihat dari *gender diversity* dan *nationality diversity*) dan reputasi kantor akuntan publik. Beberapa penelitian

terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, terdapat hasil yang tidak konsisten. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pengungkapan emisi karbon dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

*Corporate governance* yang baik (*good corporate governance*) penting untuk keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan (Manurung et al., 2022). *Corporate governance* merupakan sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan di perusahaan seperti pemegang saham yang diwakili oleh dewan komisaris dan direksi untuk mencapai tujuan perusahaan (Herdjiono & Sari, 2017). Faktor pertama yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah dewan komisaris yang dilihat dari *gender diversity* (*gender diversity* dewan komisaris).

*Gender diversity* dewan komisaris (keberadaan komisaris perempuan) dalam perusahaan dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon (Grediani et al., 2020). Hasil penelitian Ummah & Setiawan (2021), Zanra et al. (2020), dan Grediani et al. (2020) menyatakan bahwa *gender diversity* dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Dewan komisaris perempuan dapat memberikan nilai tambah dalam sebuah perusahaan karena perempuan dianggap lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih memperhatikan pengungkapan emisi karbon secara sukarela (Ummah & Setiawan, 2021). Namun, hasil penelitian Herlina & Juliarto (2019) dan Trufvisa & Ardiyanto (2019) menunjukkan bahwa *gender diversity* dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor kedua yang berpotensi memengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah dewan komisaris yang dilihat dari *nationality diversity* (*nationality diversity* dewan komisaris). *Nationality diversity* dewan komisaris adalah *diversity* dari dewan komisaris dalam satu perusahaan (Jannah & Narsa, 2021). Hasil penelitian Jannah & Narsa (2021) dan Kılıç & Kuzey (2019) menyatakan bahwa *nationality diversity* dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang memiliki *nationality diversity* dewan memiliki *audiens* yang lebih besar dan mungkin mengalami tekanan dari berbagai kelompok *stakeholders* yang berkaitan dengan perubahan iklim dan masalah pemanasan global (pengungkapan

emisi karbon) (Kılıç & Kuzey, 2019). Fungsi pengawasan komisaris asing diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam mengenali kebutuhan dan kepentingan berbagai *stakeholders*, terutama dalam hal pengungkapan emisi karbon (Harjoto et al., 2019). Namun, hasil penelitian Ummah & Setiawan (2021) dan Trufvisa & Ardiyanto (2019) menyatakan bahwa *nationality diversity* dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor ketiga yang berpotensi memengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah direksi yang dilihat dari *gender diversity* (*gender diversity* direksi). *Gender diversity* direksi dilihat dari keberadaan direktur perempuan dalam direksi perusahaan (Chika & Widianingsih, 2024). Hasil penelitian Gonenc & Krasnikova (2022) dan Al-Qahtani & Elgharbawy (2020) menunjukkan bahwa *gender diversity* direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Keberadaan direktur perempuan memengaruhi keseimbangan antara tujuan finansial dan nonfinansial perusahaan, termasuk tingkat pengungkapan emisi karbon (Wirawan & Setijaningsih, 2022). Namun, hasil penelitian Chika & Widianingsih (2024) dan Wirawan & Setijaningsih (2022) menunjukkan bahwa *gender diversity* direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor keempat yang berpotensi memengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah direksi yang dilihat dari *nationality diversity* direksi (*nationality diversity*). *Nationality diversity* direksi dilihat dari keberadaan direktur asing dalam direksi perusahaan (Fadhila & Wijayanti, 2022). Hasil penelitian Fadhila & Wijayanti (2022) dan Kılıç & Kuzey (2019) menunjukkan bahwa *nationality diversity* direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Direktur asing berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholder*), dengan mendorong kebijakan pengungkapan emisi karbon untuk meningkatkan transparansi dan reputasi perusahaan (Fadhila & Wijayanti, 2022). Namun, hasil penelitian Firza et al. (2023) dan Wulan (2022) menunjukkan bahwa *nationality diversity* direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor kelima yang berpotensi memengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah reputasi kantor akuntan publik (KAP). Reputasi KAP dilihat dari kepercayaan

masyarakat atas kinerja yang diperoleh oleh KAP itu sendiri (Akbar & Ridwan, 2019). Hasil penelitian Rohmah & Nazir (2022), Arifah & Haryono (2021), dan Wardhani & Kawedar (2019) menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan cenderung melakukan pengungkapan emisi karbon jika diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *the Big Four* (Arifah & Haryono, 2021). Namun, hasil penelitian Wardiman et al. (2023) dan Pratiwi et al. (2021) menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan masalah penelitian dan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil untuk setiap variabel penelitian. Sementara itu, mengingat bahwa POJK Nomor 51/POJK.03//2017 tentang Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan diterbitkan pada 2017 dan baru berlaku efektif mulai 2022 (Chika & Widianingsih, 2024), periode yang digunakan dalam penelitian ini berada di antara rentang waktu sejak peraturan tersebut diterbitkan dan diberlakukan (periode 2018-2022). Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Pengungkapan Emisi Karbon (Studi pada Perusahaan Subindustri Perkebunan dan Tanaman Pangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Peningkatan emisi karbon yang terjadi setiap tahun menjadi penyebab timbulnya kerusakan lingkungan (efek rumah kaca) yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari perusahaan-perusahaan yang kegiatan operasionalnya menghasilkan emisi karbon untuk melakukan upaya pengurangan dan pengungkapan emisi karbon. Perusahaan penghasil emisi karbon harus bertanggung jawab terhadap pengaruh yang diberikannya kepada lingkungan dan sosial. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Grediani et al. (2020) bahwa perusahaan-perusahaan dunia harus mewajibkan standar akuntansi memasukkan indikator pengurangan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon penting bagi perusahaan sebagai kontribusi perusahaan terhadap lingkungan. Pengungkapan

emisi karbon merupakan komitmen perusahaan dalam memitigasi perubahan iklim dan menjaga legitimasi (Arifah & Haryono, 2021). Namun, pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga jumlah pengungkapannya masih bervariasi dan pengungkapan informasi tersebut masih minim dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, pengungkapan emisi karbon dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan sehingga masih terdapat perusahaan yang tidak peduli terhadap lingkungan dan sosial karena hanya ingin memaksimalkan keuntungannya saja.

Minimnya kesadaran perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan juga menghambat pengungkapan lingkungan dan sosial yang salah satu aspeknya adalah aspek lingkungan yang berisi topik terkait pengungkapan emisi karbon. Hal ini dapat menyulitkan investor, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menilai kontribusi perusahaan-perusahaan di Indonesia, terkhusus perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, reputasi kantor akuntan publik, dan pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah *gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah *gender diversity* dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

4. Apakah *nationality diversity* dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
5. Apakah *gender diversity* direksi berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
6. Apakah *nationality diversity* direksi berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
7. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, reputasi kantor akuntan publik, dan pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, dan reputasi kantor akuntan publik secara simultan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* dewan komisaris secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *nationality diversity* dewan komisaris secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri

perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

5. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* direksi secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh *nationality diversity* direksi secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
7. Untuk mengetahui pengaruh reputasi kantor akuntan publik secara parsial terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah yang diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak, yang dikelompokkan ke dalam dua aspek sebagai berikut:

#### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat teoritis dalam pengembangan pengetahuan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, dan reputasi kantor akuntan publik terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi maupun referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengungkapan emisi karbon.

#### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang bersangkutan, yaitu:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dan meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon sehingga perusahaan dapat melakukan

pengungkapan emisi karbon lebih maksimal dalam laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan untuk menciptakan kegiatan bisnis yang berkelanjutan.

- b. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bahwa dalam mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan, hal yang perlu diperhatikan tidak hanya mengenai informasi keuangan perusahaan saja, tetapi juga mengenai transparansi dan keakuratan informasi yang disampaikan perusahaan mengenai dampak terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan, terutama mengenai perubahan iklim.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam menentukan regulasi dan peraturan terkait pengungkapan emisi karbon yang lebih detail kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir pada penelitian ini meliputi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab yang saling berkaitan satu sama lain sehingga akan didapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Berikut sistematika penulisan tugas akhir ini:

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan secara umum dan ringkas mengenai isi penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, latar belakang penelitian, perumusan masalah dijelaskan dari aspek teoritis dan praktis, tujuan penelitian, manfaat penelitian dijelaskan dari aspek teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir.

#### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini secara umum sampai khusus, di antaranya teori mengenai teori legitimasi, teori *stakeholder*, pengungkapan emisi karbon, *corporate governance*, dewan komisaris, direksi, *gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, dan reputasi kantor akuntan publik, disertai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, lalu

dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang kemudian dijadikan sebagai hipotesis penelitian.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, operasionalisasi variabel dependen (pengungkapan emisi karbon) dan variabel independen (*gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, dan reputasi kantor akuntan publik), tahapan penelitian, populasi dan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, metode pengumpulan data dan sumber data yang digunakan, teknik analisis data, serta metode pengujian hipotesis yang akan dilakukan.

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini secara keseluruhan berisi hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini memiliki dua bagian, yaitu yang pertama adalah hasil penelitian yang berisi hasil analisis data sampel penelitian (perusahaan subindustri perkebunan dan tanaman pangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022) melalui hasil penelitian yang diinterpretasikan dengan penarikan kesimpulan dan yang kedua adalah pembahasan yang berisi pembahasan secara detail mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, diikuti dengan penelitian terdahulu atau landasan teoritis yang relevan, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, dan reputasi kantor akuntan publik) terhadap variabel dependen (pengungkapan emisi karbon).

### **5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis penelitian mengenai *gender diversity* dewan komisaris, *nationality diversity* dewan komisaris, *gender diversity* direksi, *nationality diversity* direksi, dan reputasi kantor akuntan publik terhadap pengungkapan emisi karbon, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang diajukan secara teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan manfaat penelitian.